

Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia

Tirolian

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara

Abstrak: Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia. Pada zaman Belanda pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor politik yang ditentukan oleh kebijakan penguasa, yaitu Belanda baik semasa VOC maupun pemerintahan Hindia Belanda. Aspek sejarah dikotomis pendidikan di Indonesia menjadi salah satu faktor determinan untuk memberi pemahaman akan adanya kesenjangan dalam sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan kependidikan Belanda dan dikotomi pendidikan Indonesia, aspek-aspek pendidikan dikotomis, dan akibat yang ditimbulkan dikotomi pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor budaya, ilmu pengetahuan, corak masyarakat-agraris, industri maupun informasi, faktor politik dan pengaruh globalisasi. Pada zaman Belanda pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor politik yang ditentukan oleh kebijakan penguasa, yaitu Belanda baik semasa VOC maupun pemerintahan Hindia Belanda. Dengan demikian, politik pendidikan bukan hanya bagian dari politik kolonial, akan tetapi merupakan inti politik kolonial. Jenis pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Belanda bagi anak-anak Indonesia banyak ditentukan oleh tujuan-tujuan politik Belanda terutama dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi. (Nasution, 2001: 3)

Aspek sejarah dikotomis pendidikan di Indonesia menjadi salah satu faktor determinan untuk memberi pemahaman akan adanya kesenjangan dalam sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini. Adanya dikotomi pendidikan tidak lepas dari aspek sejarah dan kebijakan pendidikan di Indonesia, dengan menyadari hal tersebut, maka keberadaan dikotomis dalam pendidikan di Indonesia perlu ditelusuri melalui perspektif historis untuk memahaminya dapat menggunakan pendekatan sejarah dan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menyelidiki akar historis terjadinya dikotomis, tersebut dan akan melihat bagaimana keterkaitannya dengan konteks pendidikan di Indonesia. Dengan pokok kajian: Kebijakan kependidikan Belanda dan dikotomi pendidikan Indonesia, analisis aspek pendidikan dikotomis: filsafat ilmu, kurikulum, kelembagaan, pendanaan, lulusan dan akibat yang ditimbulkan dikotomi pendidikan. Terakhir tulisan ini juga akan diakhiri dengan kesimpulan

Pembahasan

A. Kebijakan Kependidikan Belanda dan Dikotomi Pendidikan Indonesia

Kebijakan negara di bidang pendidikan merupakan produk dari sebuah proses politik yang melibatkan berbagai elemen politik yang ada di lembaga legislatif dan eksekutif. Mereka yang terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan negara dan keputusan politik adalah orang-orang yang diberi mandat untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dan masyarakat luas. Sebagai produk dari keputusan politik, kebijakan negara di bidang pendidikan merupakan cermin dari politik pendidikan nasional yang memberikan implikasi terhadap sistem, kelembagaan, kurikulum dan proses pendidikan. (Djamas, 2009: 193).

Walaupun pada awalnya kedatangan Belanda hanya untuk berdagang mencari rempah-rempah, namun dalam perjalanan selanjutnya tidak hanya berdagang. Mereka membawa dan menyebarkan misi Kristen sekaligus juga ingin menguasai bumi Nusantara. Motivasi ini sering disebut dengan istilah “Tiga G” (*Gold, Gospel dan Glory*). *Gold* (emas) yakni berkaitan dengan ekonomi, *Gospel* (Injil, kitab suci) yakni berkaitan dengan misi penyebaran agama kristiani, dan *Glory* (kejayaan) yakni berkaitan dengan politik atau kekuasaan. Kebenaran misi ini dapat kita lihat dalam pernyataan yang terdapat pada hak octroi VOC yang berbunyi: “Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah”. (Zuhairini, 1997: 148).

Latar belakang munculnya dikotomi dalam pendidikan itu didasarkan pada beberapa kepentingan Belanda sebagai bangsa penjajah, seperti: untuk meningkatkan pengetahuan mereka berkaitan dengan ilmu-ilmu umum dan pengetahuan tentang masyarakat Indonesia, keperluan tenaga pembantu rumah tangga dari penduduk pribumi sehingga mereka diberikan pendidikan secukupnya, ingin mendapatkan simpati dari warga penduduk pribumi karena jasa pendidikan yang diberikan, kepentingan misionaris, dan lain sebagainya. (Mestoko, 1979:) Kebijakannya dalam bidang pendidikan, tidak terlepas dari pola politik penjajahnya. Alasan penyelenggaraan pendidikan pengajaran, lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah penjajah daripada kepentingan rakyat jajahnya. (Ramayulis, 2012: 250). Pemerintah Hindia Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, ini dinyatakan dalam Pasal 179 (2) I.S (*Indische Staatsregeling*) dan dalam berbagai ordonansi. Singkatnya dinyatakan sebagai berikut: Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. (Daulay, 2009: 16).

Dikotomis adalah dua kelompok yang saling bertentangan. (Depdikbud, 1990: 205). Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pertentangan antara pendidikan Belanda (HIS, MULO, AMS, dan lain-lain), dengan pendidikan Islam (Pesantren, Dayah, Surau). Pertentangan ini dapat dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan. Di sekolah-sekolah Belanda dikembangkan ilmu-ilmu umum (ilmu-ilmu sekuler). Pemerintah penjajah Belanda tidak mengajarkan pendidikan agama sama sekali di sekolah-sekolah yang mereka asuh. (Daulay, 2009: 15-16). Sedangkan di lembaga

pendidikan Islam dalam hal ini di pesantren, pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik.

Dengan demikian suasana pendidikan dikotomis itu amat kentara di zaman penjajahan Belanda. Karel A. Steenbrink mendapati bahwa asal usul sistem pendidikan yang dualistik (Saridjo, 1996: 22) di Indonesia bermula sejak zaman kolonial Belanda hingga berlanjut ke zaman kemerdekaan. (Steenbrink, 1991: 6-7).

Kedua jenis sistem pendidikan tersebut dibedakan pula dari sudut tujuan. Sekolah Pemerintah Belanda dimaksudkan untuk menghasilkan pekerja administrasi rendah untuk dipekerjakan di Pemerintahan Belanda. Sedangkan Pesantren dimaksudkan sebagai tempat belajar dan latihan bagi para siswa (santrinya) dengan berbasis pada kitab kuning (teks-teks klasik berbahasa Arab). Dalam kategori yang sejalan dengan pesantren ini adalah *Meunasah*, *Rangkang*, *Dayah*, dan *Surau*. Jika Pesantren dianggap identik dengan Jawa, maka Meunasah, Rangkang, dan Dayah identik dengan Aceh, sedangkan Surau identik dengan Sumatra Barat. (Daulay, 2001: 26).

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan dan membatasi karena kekhawatiran akan munculnya militansi kaum musliminterpelajar yang akan mengancam keberlangsungan kolonial. Akibat perlakuan negatif dari pemerintah kolonial Belanda maka pendidikan Islam termarginalkan yang mempunyai konotasi kampung dan ortodoks selain itu isi pendidikan berorientasi pada praktek ritual keagamaan kurang memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Tilaar, 169). Dampak dari Kebijakan itulah yang memicu madrasah dan pesantren mengisolir diri dari dunia luar dan berada pada kotak dan kubu sendiridengantetap mengajarkan pelajaran agama.

Wujud kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menekan itu misalnya, tercermin dalam ordoansi Tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu badan untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut dengan "*Pries Terraden*". Tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan ordonansi guru, yaitu orang yang memberikan pengajaran agama Islam harus minta izin lebih dahulu. kemudian diperbarui pada 1925tidak semua orang boleh memberikan pengajian agama kecuali mendapat rekomendasi, dan gugu-guru yang mengajar agama wajib memilki surat izin mengajar. Selain itu juga ordonansi sekolah liayang terlenal "*Wilde Schooleen ordonantie*" sejak 1932 yang dimaksudkan untuk mengawasi, membatasi dan bahkan mematikan sekolah partikelir atau sekolah swasta yang diselenggarakan orang Indonesia danTimur asing lainnya. (Hasbullah, 1999: 52).

Setelah pemerintah Belanda menyatakan politik etis maka bagi rakyat Indonesia terbukalah kesempatan untuk memasuki sekolah-sekolah, khususnya pendidikan rendah. Pada tahun 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutz didirikanlah sekolah-sekolah desa. Pada awal abad 20 muncullah sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, sekolah desa. Disebabkan karena berbagai faktor, meliputi kebijakan, (Poesponegoro, 2008: 127). fasilitas dan sarana, maka sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerinah belanda ini sangat terbatas, tidak atau belum

seimbang dengan populasi penduduk Indonesia. Di tambah pula dengan tingkat penghasilan ekonomi masyarakat Indonesia yang rendah sehingga amat sedikit di kalangan bumiputra yang bisa memasuki dan melanjutkan ke sekolah-sekolah Belanda tersebut, berkenaan dengan itu, maka alternatif lain dari lembaga pendidikan yang lebih merakyat serta bersifat *egalitarian* (pandangan yg menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat) adalah pendidikan di pesantren, surau atau dayah, maka lembaga-lembaga pendidikan itu adalah merupakan pilihan yang memungkinkan bagi masyarakat Indonesia, karena nya masyarakat muslim ketika itu banyak memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan tersebut.

Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama . (Nasution, 15-16). Politik etis terutama sebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanangkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.

Masalah lain yang paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu merupakan beban yang berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakan menjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah. Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu; *Pertama, gradualisme* yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. *Kedua, dualisme* diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. *Ketiga*, kontrol yang sangat kuat. Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung, ini bagian politik pendidikan. *Keempat*, Pendidikan berguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. *Kelima*, prinsip *konkordasi* yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. *Keenam*, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-ciri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia. (Nasution, 20)

Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yang kelam. Penjajah membuat pendidikan sebagai alat untuk meraup keuntungan melalui tenaga kerja murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya, kepentingan biaya perang yang sangat mendesak dan berbagai masalah lain menjadi kenyataan yang tercatat dalam sejarah pendidikan masa itu. (Nasution, 15-33)

Belanda membuka kesempatan pendidikan bagi rakyat pribumi, tujuannya tidak lain “membentuk kelas elite dan menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendahan/kasar. (Gunawan, 1986: 21). Secara politis, jauh sebelum kemerdekaan RI, pemerintah kolonial Belanda melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam yang notabene diselenggarakan oleh umat Islam. Kontrol tersebut dimotivasi oleh pertimbangan politis bahwa umat Islam di Nusantara adalah komunitas yang mayoritas, sehingga mesti diakomodasi kepentingan politik dan edukasinya guna mengukuhkan legitimasi kekuasaan

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan awal di Indonesia yang pada mulanya hanya berfungsi sebagai sarana islamisasi dalam arti menda'wakan dan memberikan sejumlah pengetahuan dasar tentang ajaran Islam disertai praktek-praktek tarekat dan ibadah ritual, namun selama masa penjajahan yang amat panjang, lembaga itu mengalami tekanan yang amat berat. (Mas'ud, 2004: 77).

Meskipun Pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan lama dan mempunyai sejarah panjang, namun dirasakan pesantren dan madrasah terlempar dari *mainstream pendidikan* baik pada masa Kolonial, masa pendudukan Jepang maupun pada masa setelah merdeka.

Pada zaman penjajahan, pesantren tetap eksis dalam kehidupan masyarakat muslim dengan posisi *'uzlah* yaitu terpisah dari tata kehidupan pemerintah kolonial pada umumnya. Muhaimin mengistilahkan *isolatif-tradisional*, dalam arti tidak mau menerima apa saja yang berbaur barat (kolonial) dan terhambat pengaruh pemikiran modern untuk masuk kedalamnya. Sebagai mana tampak jelas pada pendidikan pondok pesantren tradisional yang hanya menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam dan pengetahuan umum sama sekali tidak diberikan. Hakekat pendidikan Islam adalah sebagai upaya melestarikan dan mempertahankan pemikiran ulama terdahulu sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab mereka. Tujuan pendidikan adalah menyiapkan calon-calon kiyai. (Muhaimin, 2003: 80).

Pesantren kalau dilihat dari segi kulturalnya pada saat itu, ulama-ulama bersikap *non cooperation* terhadap kaum penjajah serta mendidik santrinya dengan sikap politis anti penjajah dan dalam bidang pendidikan agama pondok pesantren tidak kompromi, selain itu para ulama berusaha menghindarkan tradisi serta ajaran agama Islam dari pengaruh budaya barat (kaum penjajah) seperti sistem pendidikan, model pakaian. Oleh karena itu pondok pesantren pada masa penjajahan dipandang dari sudut *historis cultural* dikatakan sebagai *training center* dalam menggembleng kader-kader umat yang tangguh mengembangkan agama serta tertanam sifat patriotisme. (Arifin, 1995: 240-241).

Sedang pada masa pendudukan Jepang Islam kemudian diberi kesempatan atau lebih tepatnya dimanfaatkan oleh Jepang dalam rangka menjalankan kekuasaanya di Indonesia.

Sampai awal kemerdekaan pendidikan Islam tetap berada di pinggiran, keadaan ini terus berlangsung mulai dasawarsa 1950an sampai dasawarsa 1960an. Pertarungan politik dengan sistem multi partai yang mana partai politik Islam gagal dalam mewujudkan keunggulannya yang dalam banyak hal menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Begitu juga pada masa orde baru hubungan yang kurang mulus antara umat Islam dengan persiden Suharto, membuat lembaga pendidikan Islam tetap di pinggiran khususnya pesantren. Meski demikian, sejak 1970an lembaga pendidikan Islam mulai mengalami modernisasi. Sejak mukti Ali menjabat sebagai menteri agama membuat entry point modernisasi madrasah dan pesantren itu melalui SKB 3 Menteri bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam termasuk pesantren khususnya penambahan materi umum haruslah 70% dan 30% pelajaran Agama ke dalam kurikulumnya dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. (Munhanif, 1998: 313-314).

B. Analisa Aspek-aspek Pendidikan dikotomis

1. Aspek Filksafat Ilmu

Dasar filosofis pendidikan Islam merupakan kajian filosofis mengenai pendidikan Islam yang didasarkan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para sahabat nabi saw. sebagai sumber sekunder. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utamatentu saja al-Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an misalnya memberikan prinsip penghormatan kepada akal, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia dan memelihara nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah atas prinsip mendatangkan kemashlahatan dan menjauhkan kemudharatan bagi manusia. Kemudian warisan pemikiran para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan dasar penting dalam pendidikan Islam. (Azra, 1999: 9).

Dalam pendidikan Barat, ilmu tidak lahir dari pandangan hidup agama tertentu dan diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Namun sebenarnya tidak benar-benar bebas nilai tapi hanya bebas dari nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Menurut Naquib al-Attas, ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral, yang diatur oleh rasio manusia, terus menerus berubah. (Al-Attas, 1981: 20).

2. Aspek Kurikulum

Dalam muatan kurikulum, ilmu yang diajarkan di sekolah hanya ilmu umum (*science*) dan tidak digabungkan dan diarahkan pada nilai-nilai agama.

Sehingga metode tersebut akan tergiring pada pola pikir yang sekuler dan berdampak pada degradasi moral, akhirnya memicu pada rusaknya generasi Islam, disebabkan pondasi ilmu agama yang lemah. Pada akhirnya, agama dianggap tidak penting dalam persoalan ilmu dan dunia. Dari sinilah yang kemudian banyak umat Islam tergiring pada pemahaman sekuler. Karena dari sejak sekolah sampai perguruan tinggi, konsep ini terus dipraktekkan secara sadar atau tidak dapat mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir umat, disatu pihak ada pendidikan yang memperdalam ilmu pengetahuan modern yang kering dari nilai-nilai keagamaan, dan sisi lain pendidikan Islam hanya mengajarkan kurikulum yang bersumber dari kitab-kitab klasik (Daulay, 2001: 16). Kitab kuning jumlahnya sangat banyak, kitab yang diajarkan kiyai di pesantren Indonesia bervariasi tetapi adalah umumnya karya ulama-ulama Madzhab Syāfi'ī (*Syāfi'īyyah*). Pada akhir abad ke-20, kitab-kitab kuning yang beredar di kalangan kiyai di pesantren Jawa dan Madura jumlahnya mencapai 900 judul. (Bruinessen, 1999: 228-229). Contoh kitab yang dipelajari di pesantren: Kitab *'Aqīdah al-'Awām*, oleh Ahmad al-Marzūqī al-Mālikī al-Makki, *Sullam al-Tawfīq*, *Matn al-Sanūsī*, *Tijānī*, *Jauhar al-Tawhid*, oleh Ibrāhīm al-Laqqānī, kitab *Fath al-Majīd*, oleh Nawāwī al-Bantani kitab *Jawāhir al-Kamiyah* karangan Thāhir ibn Shālih al-Jazāirī. (Bruinessen, 1999: 156-157). Pesantren hanya memperdalam masalah agama yang terpisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian suasana pendidikan dikotomis amat kentara di zaman penjajahan Belanda.

3. Aspek Kelembagaan

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah di Hindia Belanda pada dasarnya merupakan cerminan dari sistem pendidikan Kolonial Belanda. Ciri-ciri umum dan bentuk kelembagaan yang diterapkan di sekolah tersebut adalah merupakan realisasi dari system pendidikan yang mereka programkan. Adanya kaitan politik dan pendidikan, agaknya ikut menjadikan system pendidikan kolonial Belanda menjadi rumit. (Steenbrink, 1991: 24). Keinginan untuk menerapkan prinsip diskriminasi menyebabkan penjenisan sekolah menjadi banyak. Sebagai gambaran tentang sistem persekolahan itu, secara garis besarnya dikemukakan beberapa lembaga pendidikan yang ada pada masa jaman penjajahan Belanda sebagai berikut;

1. MULO (*Meer Uit gebreid lager school*), sekolah tersebut adalah kelanjutan dari sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Lama belajarnya tiga sampai empat tahun, yang pertama didirikan pada tahun 1914 dan diperuntukan bagi golongan bumi putra dan timur asing. Sejak zaman jepang hingga sampai sekarang bernama SMP. Sebenarnya sejak tahun 1903 telah didirikan kursus MULO untuk anak-anak Belanda, lamanya dua tahun.
2. AMS (*Algemene Middelbare School*) adalah sekolah menengah umum kelanjutan dari MULO berbahasa belanda dan diperuntukkan golongan bumi putra dan Timur asing. Lama belajarnya tiga tahun dan yang pertama didirikan tahun 1915. AMS in terdiri dari dua jurusan (*afdeling*- bagian), Bagian A

(pengetahuan kebudayaan) dan Bagian B (pengetahuan alam), pada zaman Jepang disebut sekolah menengah tinggi, dan sejak kemerdekaan disebut SMA.

3. HBS (*Hoobere Burger School*) atau sekolah warga negara tinggi adalah sekolah menengah lanjutan dari ELS yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan golongan bumi putra atau tokoh-tokoh terkemuka. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda dan berorientasi ke Eropa Barat
4. Sekolah pertukangan (*Amachts leergang*) yaitu sekolah berbahasa daerah dan menerima sekolah lulusan bumi putra kelas III (lima tahun) atau sekolah lanjutan (*vervolgschool*). Sekolah ini didirikan bertujuan untuk mendidik tukang-tukang. Didirikan pada tahun 1881. (Sanjaya, 2007: 207).
5. Sekolah pertukangan (*Ambachtsschool*) adalah sekolah pertukangan berbahasa pengantar Belanda dan lamanya sekolah tiga tahun menerima lulusan HIS, HCS atau schakel. Bertujuan untuk mendidik dan mencetak mandor jurusnya antara lain montir mobil, mesin, listrik, kayu dan piñata batu
6. Sekolah teknik (*Technish Onderwijs*) adalah kelanjutan dari *Ambachtsschool*, berbahasa Belanda, lamanya sekolah 3 tahun. Sekolah tersebut bertujuan untuk mendidik tenaga-tenaga Indonesia untuk menjadi pengawas, semacam tenaga teknik menengah dibawah insinyur.
7. Pendidikan Dagang (*Handels Onderwijs*). Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Eropa yang berkembang dengan pesat.
8. Pendidikan pertanian (*landbouw Onderwijs*) pada tahun 1903 didirikan sekolah pertanian yang menerima lulusan sekolah dasar yang berbahasa pengantar Belanda

Dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama dalam arti kelembagaan yang dimana hal ini merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda, karena anak-anak yang bisa masuk sekolah Belanda sebelum kemerdekaan hanya 6% dan terbatas bagi anak kaum bangsawan dan saudagar, maka anak orang Islam memilih madrasah atau pondok pesantren, yang memang sudah ada sebelum munculnya sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Dikotomisasi antara lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan pada salah satu aspek, ini jelas sekali terefleksi di Indonesia.

4. Aspek pendanaan

Bentuk lain dari diskriminasi pemerintah penjajah berkaitan dengan pendidikan di Indonesia dilihat pada alokasi anggaran. Anggaran pendidikan lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah untuk anak-anak Eropa, padahal jumlah siswa di sekolah-sekolah Bumiputra terdapat 162.000 siswa, sementara di sekolah Eropa hanya 2.500 siswa. Tetapi sangat ironis, uang yang dialokasikan untuk sekolah Bumiputra hanya f. 1.359.000 sementara yang diberikan pada sekolah-sekolah Eropa dua kali lipat lebih banyak yakni f. 2.677.000. Pada tahun 1915, ketika siswa di Bumiputra telah mencapai 321.000 siswa anggaran yang disediakan berjumlah f. 1.493.000. Pada tahun yang sama, siswa di sekolah Eropa hanya bertambah menjadi 32.000 tetapi uang yang dialokasikan mencapai f. 6.300.000.25 (Mestoko, 123).

Untuk biaya sekolah pemerintah kolonial telah memberikan sebuah diskriminasi antara anak-anak Eropa dan pribumi, dimana anak-anak Eropa membayar uang sekolah sebesar f.7,5 sebulan sedangkan anak-anak pribumi sebesar f.15,0 sebulan. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah kolonial di dalam menyaring orang-orang pribumi untuk bersekolah dengan menerapkan biaya sekolah yang tinggi. (Nasution, 1983: 40). Pada tahun 1888 menteri kolonial menolak memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah Islam, dengan alasan Gubernur Jendral tidak mau mengorbankan keuangan negara untuk sekolah-sekolah tersebut. (Steenbrink, 1991: 6-7).

5. Aspek Lulusan

Lulusan yang dididik secara barat, akan memiliki jiwa ke barat-baratan, cara berpikirnya juga secara barat, juga kehidupan sehari-hari secara barat, dengan demikian lapisan atas tidak lagi mengenal kejiwaan bangsanya dan tidak mengenal kebudayaan bangsanya. Tragisnya sungguhpun mereka telah lulus dan berijazah perguruan tinggi belum di anggap sempurna seperti orang belanda yang menjajah. Sebaliknya pemuda-pemuda murid kelas II *Vervolkschool* dan sekolah desa pengetahuan masih sederhana sekali. Pengetahuan tamatan sekolah ini ialah: membaca, bahasa daerah, bahasa Indonesia dan berhitung. Mereka tidak mempunyai kecakapan untuk mempergunakan tangannya, bekerja dan berkarya untuk kemajuan hidupnya. Selain lulusan sekolah menganggap dirinya lebih mulia dan lebih tinggi dari pada temannya. Pendidikan tersebut seolah-olah mematikan jiwa bangsa kita, daya ciptanya hampir mati, jiwa mereka diliputi oleh rasa pengabdian kepada pemerintah penjajah, boleh dikatakan bahwa bangsa kita pada waktu itu berjiwa buruh yang memikirkan makan saja. (Barnadib, 1983: 33-34).

Kedua Lulusan (pesantren dan sekolah), memiliki filosofi yang berbeda yang sekaligus melahirkan out put yang memiliki orientasi yang berbeda pula. bagi mereka yang lulusan perguruan tinggi lebih kaya dari segi intelektualnya dan lemah dalam segi moralnya, sedangkan pesantren menghasilkan siswa yang kolot namun kuat dalam ilmu agama serta memiliki moralnya yang bagus. Pada waktu itu muncullah perbedaan yang tajam antara lulusan sekolah umum dan lulusan yang dididik di lembaga pendidikan Islam, sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama terlihat pada fase terakhir abad ke-19, serta di lanjutkan dan diperkuat pada abad 20. (Daulay, 2009: 16).

C. Akibat yang ditimbulkan dikotomi pendidikan

Pendidikan yang telah dirasuki oleh dikotomi dan dualisme, akan menampilkan wajah yang kurang mengesankan untuk dipandang. pendidikan yang dilakukan dengan sistem dualisme dan dikotomis itu akan berdampak pada pengelolaan pendidikan nasional. Pendidikan yang dikotomis dan dualisme itu akan membawa dampak yang negatif bagi semua unsur yang terkait dengannya.

Ada empat dampak dari dikotomi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama, yaitu:

Pertama; Munculnya ambivalensi orientasi pendidikan Islam, dimana selama ini, lembaga-lembaga semacam pesantren dan madrasah mencitrakan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam dengan corak *tafaqquh fi al-din* yang menganggap persoalan mu'amalah bukan garapan mereka. Sementara itu, modernisasi sistem pendidikan dengan memasukkan kurikulum pendidikan umum ke dalam lembaga-lembaga tersebut telah merubah citra pesantren dan madrasah sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din* tersebut. Akibatnya, telah terjadi pergeseran makna bahwa mata pelajaran agama hanya menjadi stempel yang dicapkan untuk mencapai tujuan sistem pendidikan modern yang sekuler.

Kedua; Munculnya kesenjangan antara sistem pendidikan Islam dan ajaran Islam. Sistem pendidikan yang ambivalen mencerminkan pandangan dikotomis yang memisahkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Pandangan tersebut jelas bertentangan dengan konsep ajaran Islam sendiri yang bersifat integral, dimana Islam mengajarkan harus adanya keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat.

Ketiga; disintegrasi sistem pendidikan Islam, terjadinya dikotomi sistem pendidikan Islam, dimana masing-masing sistem pendidikan (umum/Barat dan agama/Islam) berusaha mempertahankan eksistensinya.

Keempat; Munculnya inferioritas pengelola lembaga pendidikan Islam. Hal ini disebabkan sistem pendidikan Barat yang pada kenyataannya kurang menghargai nilai-nilai kultural dan moral telah dijadikan tolok ukur kemajuan dan keberhasilan sistem pendidikan Indonesia. (Ismail, 2001: 87-89).

Dampak Dikotomi antara sistem pendidikan warisan kolonial dengan sistem pendidikan tradisional terus berlangsung cukup lama, di awal kemerdekaan pemerintah mengembangkan lembaga pendidikan persekolahan sebagai mainstream sistem pendidikan nasional, apa yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini berarti, sekalipun dunia muslim (bangsa Indonesia) merdeka namun sebenarnya bersifat politis belaka, sebab bidang lain-lain ekonomi, budaya, sistem sosial dan termasuk sistem pendidikan, penjajahan tetap berlangsung, sehingga ketergantungan di bidang pendidikan yang di sadari sebagai faktor terpenting dalam membina umat hampir tidak dapat dihindarkan dari pengaruh barat. Imbasnya kaum muslimin menyembunyikan identitas Islamnya karena rasa takut dan malu, disebabkan ketidakberdayaan umat muslim itu, ternyata sikap seperti ini banyak melanda umat Islam. (Ismail, 2001: 86).

D. Kesimpulan

Penjajah Belanda yang menerapkan diskriminasi terhadap rakyat jajahannya. Belanda membiarkan kebodohan agar mudah ditindas, dijajah dan diadudomba. Kemudian sedikit ada perubahan setelah ada tekanan internasional yang dikenal dengan politik etis, Belanda tidak suka terhadap keberadaan pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren, madrasah. Sementara kalangan pendidikan Islam menganggap Belanda sebagai orang kafir yang harus diperangi.

Dikotomis yang berlangsung dalam dunia pendidikan Islam akan menciptakan individu-individu yang pecah. Yaitu pribadi intelektual yang memahami ilmu-ilmu keagamaan tetapi tidak mempunyai pemahaman tentang adanya kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini, yang memberikan dampak pada ketidakmampuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi adanya persaingan yang ketat dalam dunia yang serba canggih. Dan sebaliknya, adanya pribadi intelektual yang mampu menguasai dan menghadapi adanya perkembangan yang serba modern dan maju dengan baik, tetapi dalam dirinya tidak memiliki pemahaman ilmu-ilmu keagamaan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mas'ud *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi* Yogyakarta: LKIS,2004
- Ary H. Gunawan , *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Arifin, M. *Kafita Seleka Pendidikan Islam (Islam dan Umum)*, cet. 3 Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Azyumardi Azra,*Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994.
-*Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi dan Modernisasi*, terj. Iding Rasyidin. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Azyumardi Azra & Saiful Umam (ed), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta: INIS, PPIM IAIN Jakarta & Litbang Depag RI 1998)
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi- Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1999.
- Haidar Putra Daulay,*Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*,Bandung: Citapustaka Media, 2001.
-*Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
-*Historisitas dan Eksistensi: Pesantren Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
- H.A.R Tilaar, *Paradigma baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Dhopier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cet. 4, (Jakarta: LP3ES, 1985.
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PSAPM, 2003.

- Madjid, Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret perjalanan* Jakarta: Paramadina, 1997.
- Marwan Saridjo, *Bunga Rampa Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Amisisco, 1996
- Nasution, S, *Asas-asas kurikulum, cet. 2*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ramayulis, *Sejarah pendidikan Islam, cet. 1*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012
- SM, Ismail, (ed), *Paradigma Pendidikan Islam, cet. 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sumarsono Mestoko, dkk, *Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman, cet.2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1979
- Sutari Imam Barnadib, *Sejarah Pendidikan, cet.1*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 1983
- Steenbrink, A Karel, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen, cet. 2*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- W. Sanjaya, *Kajian Kurikulum dan Pembelajaran*, Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI, 2007
- Zuhaerini, Dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. Ke-5, 1997